

POTENSI KAMPUNG NELAYAN SEBAGAI MODAL PERMUKIMAN BERKELANJUTAN DI TAMBAKLOROK, KELURAHAN TANJUNG MAS

Oleh:

Sonya Dimitra¹ dan Nany Yuliasuti²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Email : nya.onya@yahoo.com

Abstrak

Kampung Tambaklorok, di Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara adalah kampung nelayan yang letaknya di pesisir pantai Laut Jawa, perkampungan ini dikenal karena keberadaan sarana perdagangan berupa TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Kawasan pinggiran yang berkembang menjadi kawasan permukiman ini memiliki permasalahan yang hampir sama dengan perkampungan nelayan di pesisir Indonesia yaitu kemiskinan dan kondisi sarana dan prasarana yang tidak memadai. Akan tetapi dibalik permasalahan tersebut diindikasikan terdapat potensi yang mampu menjadi modal untuk permukiman berkelanjutan. Maka disimpulkan suatu pertanyaan penelitian yaitu potensi apakah yang terdapat di kampung nelayan Tambaklorok yang dapat dijadikan modal permukiman berkelanjutan?. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi kampung nelayan Tambaklorok yang dapat menjadi modal permukiman berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan analisis terkait dengan kualitas kondisi ketersediaan sarana dan prasarana, analisis kualitas hunian tempat tinggal, analisis kondisi sosial masyarakat, analisis kondisi perekonomian masyarakat dan analisis potensi kampung nelayan sebagai modal permukiman berkelanjutan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kampung Tambaklorok belum terindikasi sebagai permukiman berkelanjutan untuk itu potensi kampung nelayan berupa aspek sosial dapat menjadi modal untuk permukiman berkelanjutan. Adapun modal sosial tersebut dapat menunjukkan bahwa dibalik kekurangan kampung nelayan yang memiliki ciri kumuh dan miskin karena keterbatasan kondisi sarana prasarana, kondisi perekonomian yang lemah terdapat suatu modal yang mampu menjadikan kampung nelayan Tambaklorok sebagai permukiman berkelanjutan.

Kata kunci : Potensi Kampung nelayan, Modal Sosial, Permukiman berkelanjutan

Abstract

Kampung Tambaklorok, in Tanjungmas, North Semarang is located in coastal of the Java Sea. This Kampung is known because of the existence of TPI (Tempat Pelelangan Ikan). On one hand, this fringe area that develops into residential compound has several problems that is similar with fisherman villages in Indonesia coastal, such as poverty, and inadequate facilities and infrastructures. On the other hand, behind these problems there are some potentials that can be a capital for sustainable settlements. This study examines the potential of Kampung Nelayan Tambaklorok that can be a capital of sustainable settlements. Some analysis are realized to reach the aim of this study: analysis as of quality of the facilities and infrastructure availabilities, analysis of quality of a residential dwelling, analysis of social and economic condition of the community, and potential Kampung Nelayan analysis as a capital for sustainable settlements. The result of this study shows that Kampung Tambaklorok

has not been alleged as a sustainable settlements. But this kampung has social aspects that can be a capital for becoming a sustainable settlements. To conclude, beyond of the problems such as lack of infrastructure which leads to poverty and slums settlements, this kampung has valuable capital to make it a sustainable settlements.

Keyword : Potential of Kampung Nelayan, Social Capital, Sustainable Settlements

PENDAHULUAN

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara daratan dan lautan. Untuk daratan masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan airnya pun asin tidak berbeda dengan air laut, sedangkan lautan meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alam yang terjadi di daratan, yaitu sedimentasi dan aliran air tawar yang disebabkan oleh kegiatan manusia yang bermukim di daratan seperti pencemaran lingkungan (Soegiarto, 1976: Dahuri et al, 2001). Wilayah pesisir yang berkembang menjadi kawasan permukiman adalah salah satu hal yang sangat kompleks, dimana selain aspek sosial, ekonomi, aspek-aspek budaya dan politik masyarakat juga akan ikut terlibat (Brahtz, 1972).

Permukiman yang letaknya tepat berada di bibir pantai ini adalah kampung yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kampung-kampung di pesisir seperti kampung nelayan sangat potensial menjadi daerah yang kumuh dengan masyarakat yang mayoritas adalah masyarakat miskin. Permukiman nelayan adalah perkampungan yang mendiami daerah kepulauan, sepanjang pesisir termasuk danau dan sepanjang aliran sungai.

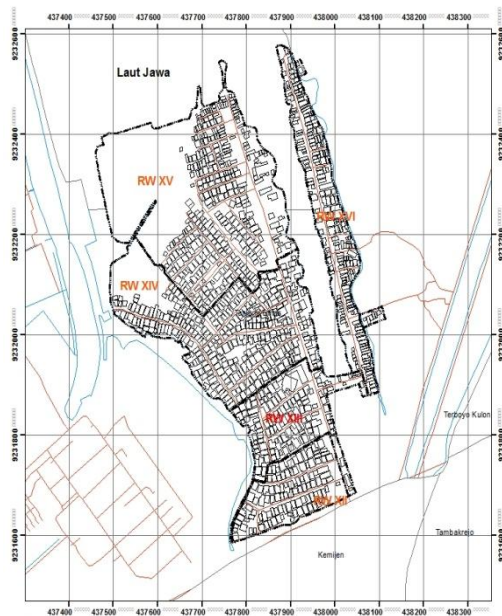
Penduduk di kampung nelayan tidak seluruhnya menggantungkan hidup dari kegiatan menangkap ikan, akan tetapi masih ada bidang lain seperti usaha pariwisata bahari, pengangkutan antar pulau, pedagang perantara/ eceran hasil tangkapan nelayan, dan usaha-usaha lainnya yang berhubungan dengan laut dan pesisir (Pangemanan, 2002: 2). Penduduk yang tinggal di kampung nelayan memiliki karakteristik berupa masyarakat tradisional dengan kondisi

sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan yang relatif terbatas. Kondisi sosial masyarakat kampung nelayan yang seperti ini membuat mereka sulit untuk mendapatkan kebutuhan bermukim yang memadai. Bahkan masyarakat kampung nelayan cenderung menjadi subyek yang menanggung permasalahan yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu rendahnya pengetahuan dan lemahnya ekonomi sehingga aktivitas mereka juga sering menyebabkan tekanan terhadap lingkungan kampung nelayan yang berlanjut pada kerusakan pada ekosistem yang ada disana.

Untuk mencapai permukiman pesisir yang berkelanjutan dan optimal, terdapat tiga aspek sebagai pilar keberlanjutan yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Semua aspek tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat pesisir berperan sebagai pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Konsep tersebut sejalan dengan pengertian tentang masyarakat berkelanjutan, yaitu masyarakat sebagai pelaku yang hidup dalam batas-batas lingkungan yang saling mendukung (Contanza, Norton dan Haskell, 1992).

Di sisi lain, menurut Emil Salim (2003) dalam suatu permukiman terdapat tiga tumpuan pembangunan dalam permukiman berkelanjutan, yaitu modal sosial, modal ekonomi, dan modal alam/ lingkungan. Ketiganya mempengaruhi kuantitas dan kualitas tingkat pembangunan berkelanjutan. Perbedaannya terletak dalam proses penggunaannya. Modal ekonomi dan modal lingkungan menipis jika dipakai, tetapi modal sosial justru semakin bertambah kuat jika digunakan. Modal sosial mempunyai pengertian modal yang

dimiliki oleh masyarakat di dalam suatu lingkup tempat tinggal untuk pemberdayaan masyarakat. Modal ini merupakan perpaduan antara karakteristik, kegiatan dan aktivitas masyarakat yang sifatnya nonmaterial. Modal sosial memiliki wujud berupa kepercayaan dan sistem kebersamaan dalam suatu lingkungan masyarakat.

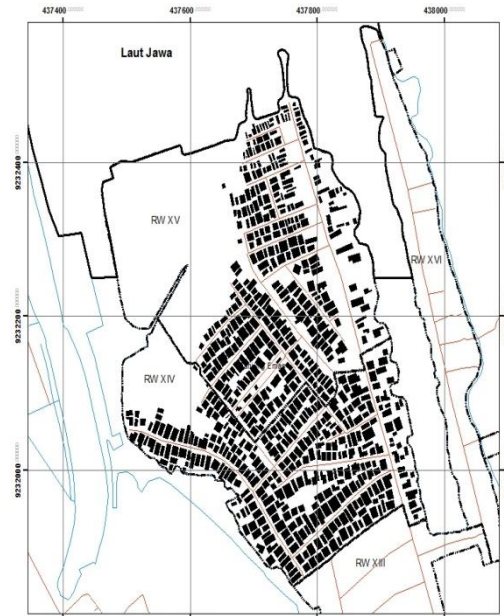


Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2012

Gambar 1
Peta Persebaran Bangunan
Kampung Tambaklorok

Kampung Tambaklorok adalah salah satu perkampungan nelayan yang letaknya berada di garis pantai Laut Jawa. Kampung ini terletak tepat di pinggiran Kota Semarang bagian utara yang langsung berbatasan dengan perairan Laut Jawa. Tambaklorok merupakan bagian dari Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Wilayah ini terdiri dari 5 RW yaitu RW XII, RW XIII, RW XIV, RW XV dengan cakupan wilayah daerah Tambakmulyo bagian barat, sedangkan RW XVI mencakup wilayah Tambakrejo bagian timur. RW XII terletak berdampingan langsung dengan jalan arteri Yos Soedarso lalu menuju arah utara terdapat RW XIII, XIV dan RW XV,

sedangkan RW XVI terletak di sebelah timur yang dipisahkan oleh sungai. Kampung Tambaklorok merupakan area permukiman dan tambak seluas ± 101 Ha dengan luas lahan permukiman yang terbangun adalah 12,3 Ha untuk RW XIV, sedangkan RW XV memiliki luas 8,1 Ha. Kedua RW memiliki KK berjumlah 570 KK.



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2012

Gambar 2
Peta Persebaran Bangunan
Lokasi Studi RW XIV dan RW XV

Kampung Tambaklorok memiliki potensi yang sangat besar terutama dalam produksi hasil laut. Di kampung tersebut terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dimana banyak masyarakat dari luar Tambaklorok yang datang untuk sekedar membeli hasil laut. Pada tahun 2009 Tempat Pelelangan Ikan tersebut dapat memproduksi sebesar 74.037 kg dengan nilai produksi Rp 198.183.700,00, lalu pada tahun 2010 terjadi kenaikan nilai produksi yaitu sebesar Rp 271.668.500,00 dengan jumlah produksi 50.052 kg (Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Semarang, 2011).

Sesungguhnya pemerintah telah menyediakan tempat khusus bagi

pedagang TPI untuk berjualan yang letaknya tidak jauh dari lokasi yang sekarang, namun dikarenakan kondisi tempat yang terlalu sempit tersebut para pedagang TPI enggan dipindahkan. Sehingga para pedagang tetap memilih berjualan di pinggir-pinggir jalan lokal yang menghubungkan jalan RW XIV dan RW XV.

Dalam perkembangan permukiman berkelanjutan terdapat suatu interaksi antara sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan, namun dalam kenyataannya permukiman yang dihuni oleh masyarakat kelas menengah ke bawah sulit untuk mencapai tiga pilar pokok interaksi sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal tersebut cukup miris karena masyarakat yang tinggal dekat dengan segala potensi sumber daya alam tidak dapat hidup selaras dan seimbang bahkan kondisi tempat tinggal mereka serba kurang. Hal tersebut yang menjadi penghambat keberlanjutan perkembangan permukiman. Seperti halnya kawasan pesisir, Kampung Tambaklorok yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup dengan memanfaatkan hasil laut, tidak sepenuhnya merasakan keuntungan tinggal di pesisir. Mereka harus menghadapi berbagai macam permasalahan, yaitu tidak layaknnya tempat tinggal karena masih ada ditemukan rumah dengan jenis non permanen, serta belum tersedianya sistem persampahan yang baik karena masyarakat lebih memilih menimbun sampahnya di lahan kosong ataupun di tepi laut. Selain itu, belum adanya perkerasan jalan lokal yang menghubungkan RW XIV dengan RW XV menuju arah utara pantai serta adanya rob yang sering melanda semakin memperparah kondisi kampung ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bermaksud untuk mengidentifikasi potensi yang terdapat di kampung nelayan dengan pertanyaan penelitian **“Potensi apakah yang dapat menjadi modal permukiman berkelanjutan di kampung nelayan Tambaklorok?”**. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai modal permukiman berkelanjutan.

METODE ANALISIS

Metode analisis yang digunakan dalam analisis deskriptif kuantitatif adalah analisis pembobotan. Teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengelompokkan data atau mengubah data mentah seperti jawaban dari kuesioner yang nantinya akan diolah menjadi data berkelompok. Untuk mengubah data primer tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi perlu diperhatikan langkah-langkah, yaitu menentukan banyaknya kelas interval yang akan dibuat dengan menggunakan jumlah data. Menurut Sturges ada aturan mengenai pembentukan banyaknya kelas, yaitu dengan rumus:

$$K = 1 + 3,322 \log n$$

Dimana : k= banyaknya kelas
n= jumlah variabel

Wilayah kelas atau range dari data yang dihadapi adalah selisih antara nilai data yang terbesar dan nilai data yang terkecil. Dalam perhitungan ini maka akan ditemukan:

$$\begin{aligned} K &= 1 + 3,322 \log 4 \\ &= 1 + 3,322 (0,6) \\ &= 3 \end{aligned}$$

Pembobotan yang digunakan adalah baik, cukup, buruk yang ditentukan berdasarkan pertimbangan, yaitu kriteria yang ditentukan dari masing-masing variabel, jawaban responden serta hasil perhitungan nilai indeks.

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{(\sum \text{skor hitung} - \sum \text{skor terkecil})}{(\sum \text{skor terbesar} - \sum \text{skor terkecil})} \times 3$$

Tabel 1
Tingkat Kualitas Berdasarkan
Nilai Indeks

Jumlah Skor	Tingkat
0-1	Buruk
1,1-2	Cukup
2,1-3	Baik

Sumber: Nazir, 1998

ANALISIS POTENSI KAMPUNG NELAYAN SEBAGAI MODAL PERMUKIMAN BERKELANJUTAN

Analisis Ketersediaan Kondisi Sarana Umum

Analisis kualitas kondisi ketersediaan sarana umum yang ada di RW XIV dan RW XV dinilai berdasarkan jarak pencapaian dari tempat tinggal menuju sarana dan ketersediaan kebutuhan yang disertai analisis mengenai kondisi sarana umum tersebut. Berdasarkan penilaian, sarana umum yang tersedia di kawasan ini terdiri dari sarana peribadatan yaitu mushola, sarana perdagangan berupa ketersediaan TPI, pasar, toko/ warung, sarana pemerintahan dan ruang terbuka yang biasa digunakan para warga sebagai sarana olahraga maupun tempat bermain untuk umum. Penilaian akan sarana-sarana tersebut dibagi menjadi tiga kategori, yaitu baik, cukup, dan buruk. Berdasarkan perhitungan dapat diketahui tingkat kualitas sarana umum yang tersedia rata-rata nilai indeks 1,02. Dengan demikian kualitas sarana umum di kawasan tersebut masuk dalam kategori **“cukup”**. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya ketersediaan sarana umum di Kampung Tambaklorok RW XIV dan RW XV telah bisa melayani para warga, namun tidak mampu dengan baik menjangkau seluruh masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Analisis Ketersediaan Kondisi Prasarana Umum

Analisis kualitas kondisi ketersediaan prasarana diukur berdasarkan kondisi jaringan jalan, persampahan, jaringan drainase, air bersih dan sanitasi. Berdasarkan perhitungan dari lima indikator tersebut diketahui bahwa tingkat kualitas prasarana umum di Kampung Tambaklorok RW XIV dan RW XV dalam kondisi **“cukup”** dengan rata-rata nilai indeks 1,22. Pada

dasarnya prasarana umum telah tersedia di kawasan ini namun kondisinya masih pada batas sedang atau cukup. Adapun jaringan drainase yang seharusnya dijadikan saluran pembuangan limbah cair, dalam kondisi tersumbat karena banyak sampah di dalam drainase. Akibatnya, jaringan drainase di RW XIV dan RW XV tidak berfungsi. Selain itu ketersediaan MCK umum belum dimanfaatkan masyarakat dengan baik karena ada salah satu unit MCK yang terletak di RT 1 RW XV tidak dimanfaatkan oleh warga.



Sumber: Hasil Observasi peneliti 2012

Gambar 3 MCK Umum Tidak Terawat di RW XV RT I

Analisis Kondisi Hunian Tempat Tinggal

Untuk mencapai rumah yang sesuai dengan fungsinya dibutuhkan penilaian kualitas hunian tempat tinggal berdasarkan kualitasnya. Oleh karena itu, dilakukan penilaian kualitas hunian tempat tinggal yang diukur berdasarkan lima indikator yang sudah ditentukan, yaitu jenis dan kondisi rumah, kepadatan bangunan, status rumah, kebersihan rumah, dan perbaikan rumah. Berdasarkan perhitungan pembobotan pada masing-masing indikator untuk menilai kualitas tempat tinggal, maka didapatkan rata-rata nilai indeks 1,29. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa kualitas hunian tempat tinggal di Tambaklorok RW IV dan RW XV termasuk dalam kategori **“cukup”**.

Analisis Kondisi Sosial Masyarakat

Analisis kondisi sosial masyarakat dihitung berdasarkan tujuh indikator yaitu frekuensi interaksi, frekuensi perkumpulan RT, frekuensi kerja bakti, kepedulian bertetangga, tingkat keamanan, frekuensi konflik, dan tingkat kekerabatan. Berdasarkan perhitungan, didapatkan bahwa rata-rata nilai indeks 2,02. Dari hasil penilaian kualitas tersebut dapat dipastikan bahwa masyarakat Kampung Tambaklorok RW XIV dan RW XV termasuk dalam kategori masyarakat *gemeinschaft* yang mengindikasikan bahwa hubungan sosial dan hubungan kekeluargaan di kampung nelayan tersebut masih kuat.



Sumber : Hasil Observasi peneliti 2012

Gambar 4
Aktivitas Berkumpul di RT 01 RW XIV



Sumber : Hasil Observasi peneliti 2012

Gambar 5
Gotong Royong di RT 03 RW XIV

Analisis Kondisi Perekonomian Masyarakat

Berdasarkan pembobotan pada setiap indikator yaitu pendapatan, pekerjaan sampingan dan kepemilikan

tabungan didapatkan total nilai 132 dengan nilai indeks 0,30. Dari nilai tersebut dapat ditentukan bahwa kualitas ekonomi masyarakat Tambaklorok RW XIV dan RW XV dalam kategori “buruk”. Masyarakat bekerja sebagai nelayan, buruh, dan pedagang ikan dengan rata-rata pendapatan sebesar 500.000-1.500.000/bulan. Para nelayan setiap hari mendapatkan penghasilan kotor dari penjualan hasil tangkapannya sebesar 500.000 lalu dipotong untuk membeli bahan bakar solar kapal sebesar 300.000. Dengan demikian, pendapatan bersih hanya 200.000/hari. Bahkan bila hasil tangkapan sedikit atau konsumen sepi mereka bisa mendapatkan keuntungan kurang dari 200.000.



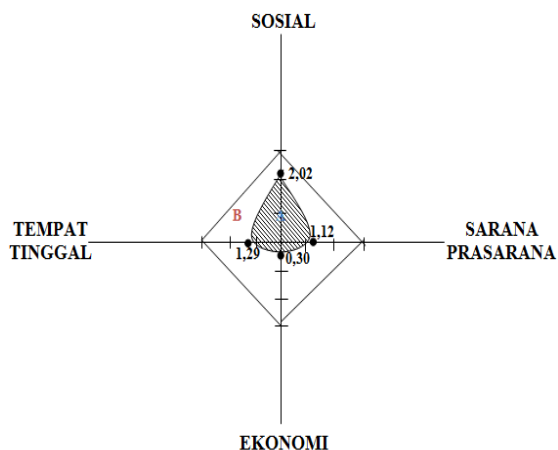
Sumber: Hasil Observasi peneliti 2012

Gambar 6
Nelayan Pulang Melaut di RT 02 RW XV

Para buruh yang bekerja di tempat pengolahan ikan dan terasi mendapatkan gaji perhari 30.000 yang dibayar setiap minggu dengan intensitas bekerja setiap hari, dari pagi hingga sore hari. Selain itu berdasarkan observasi lapangan dan kuesioner yang telah disebar kepada responden di Kampung Tambaklorok RW XIV dan RW XV, dapat dijelaskan bahwa sebesar 45% hanya menempuh pendidikan hingga tamat SMP/MTS. Hal ini berarti masyarakat Kampung Tambaklorok RW XIV dan RW XV belum memiliki pendapatan yang layak sehingga mereka termasuk dalam ekonomi lemah dan masih sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Analisis Potensi Kampung Nelayan sebagai Modal Permukiman Berkelanjutan

Dari diagram keberlanjutan berdasarkan tingkat kualitas lingkungan, ekonomi, dan sosial dapat dilihat bahwa bagian A merupakan hasil penilaian kualitas sosial, sarana prasarana, tempat tinggal dan ekonomi di Kampung Tambaklorok. Dari penilaian tersebut terlihat bahwa Kampung Tambaklorok belum menjadi permukiman yang berkelanjutan karena kualitas lingkungan, sosial, dan ekonomi tidak seimbang dan belum mencapai nilai tertinggi, yaitu tiga. Dengan demikian, bagian B adalah kekosongan yang belum tercapai di Kampung Tambaklorok sebagaimana permukiman yang berkelanjutan. Aspek sosial menduduki posisi yang sangat besar dengan nilai indeks 2,02. Ketiga nilai aspek keberlanjutan tersebut mengisyaratkan bahwa Kampung Tambaklorok belum memenuhi syarat untuk menjadi permukiman yang berkelanjutan, sebagaimana hal ini juga diperkuat dalam Agenda Nasional 21.



Sumber: Hasil Analisis 2012

Gambar 7
Diagram Keberlanjutan
Kampung Tambaklorok

Dalam Agenda Nasional 21 tentang kebijakan permukiman yang berkelanjutan

dan tempat bernaung yang layak bagi masyarakat, Kampung Tambaklorok tidak mencakupi syarat yang sudah dijelaskan dalam Agenda Nasional 21 diantaranya, pembiayaan perumahan yang tidak efisien, efektif dan terjangkau, serta belum terciptanya otonomi yang dapat dipercaya dengan perbaikan pada kemampuan Pemerintah daerah (Pemda) setempat dalam mengelola pembangunan permukiman nelayan. Pada saat ini kewenangan di pemerintah daerah hanya berpusat pada pemerintahan pusat. Hal ini juga menjelaskan bahwa belum ada hubungan kemitraan yang kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan permukiman, sarana dan prasarana.

Di sisi lain, berdasarkan hasil penilaian kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi, diketahui bahwa kualitas sosial masyarakat dalam kategori **"baik"**. Aspek sosial tersebut merupakan potensi yang mampu dijadikan modal permukiman berkelanjutan di Kampung Tambaklorok RW XIV dan RW XV. Modal sosial ini berupa interaksi antar masyarakat yang selalu terjalin sehingga komunikasi tidak akan pernah putus. Komunikasi tersebut berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk saling menyapa, mengobrol, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui kondisi masing-masing individu ataupun kondisi hunian mereka. Dengan adanya kegiatan-kegiatan sosial, seperti perkumpulan RT dan kerja bakti, dapat membangun masyarakat untuk aktif menjaga lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga masyarakat mampu menjadi stakeholder yang aktif di komunitas mereka. Kegiatan-kegiatan tersebut berfungsi sebagai wadah aktivitas masyarakat sehingga dapat tercipta lingkungan binaan manusia.

Berdasarkan Teori Woolcock (2001), modal sosial yang ada di Kampung Tambaklorok adalah modal sosial berupa *community*, yaitu sekumpulan masyarakat yang tinggal di permukiman dalam jangka waktu yang lama, dengan memiliki ciri-ciri berupa mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan dan pekerjaan lain yang

masih berhubungan dengan laut, seperti buruh pengolahan ikan asin, pembersih kerang, pedagang ikan, dan lain sebagainya. Mereka semua memiliki kepentingan masing-masing namun mereka tergabung dalam suatu lingkup RT dan RW yang memiliki tujuan bersama.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Kesimpulan pertama yaitu mengenai kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi di kampung Tambaklorok RW XIV dan RW XV. Kualitas sarana dan prasarana umum dalam kondisi “cukup” dengan nilai indeks 1,12 dari nilai maksimal 3. Kualitas hunian tempat tinggal termasuk dalam kategori “cukup” dengan nilai indeks 1,29 dari nilai maksimal 3.

Berdasarkan penilaian pembobotan mengenai kualitas sosial masyarakat dapat dipastikan bahwa kualitas sosial masyarakat di Kampung Tambaklorok RW XIV dan RW XV dalam tingkat yang “baik” dengan nilai indeks 2,02 dari nilai maksimal 3. Analisis mengenai kondisi ekonomi masyarakat menyatakan bahwa berdasarkan penilaian pembobotan pada setiap indikator mengenai kualitas ekonomi masyarakat didapatkan nilai indeks 0,30 dari nilai maksimal 3.

Kesimpulan kedua, dengan melihat penilaian kualitas berdasarkan tiga pilar keberlanjutan yaitu aspek lingkungan, sosial dan ekonomi, dapat diketahui bahwa Kampung Tambaklorok belum memiliki syarat menjadi permukiman berkelanjutan sebagaimana yang dituangkan dalam Agenda Nasional 21. Dari ketiga aspek tersebut dipilih aspek yang memiliki kualitas paling baik yang merupakan potensi sebagai modal permukiman berkelanjutan. Berdasarkan hasil penilaian kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi, maka diperoleh kualitas sosial masyarakat dalam kategori “**baik**”. Dengan demikian, aspek sosial adalah potensi yang mampu dijadikan modal permukiman berkelanjutan. Aktivitas sosial masyarakat yang saling terjalin akan menghasilkan suatu bentuk fisik dari waktu ke waktu. Dalam hal ini pertumbuhan tidak hanya secara fisik

lingkungan, namun lingkungan tersebut akan tumbuh bersama masyarakat.

Rekomendasi

Rekomendasi yang diusulkan kepada pemerintah yaitu pemerintah hendaknya bekerjasama dengan pihak swasta untuk memberikan dana bantuan perbaikan pasar dan TPI serta bantuan berupa pembangunan balai pertemuan warga. Selain itu, hendaknya pemerintah mengadakan pengembangan dan fasilitator UKM serta pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana umum secara optimal dan efisien.

Rekomendasi yang diusulkan kepada masyarakat terkait dengan kontribusinya pada perubahan perilaku pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Pertama, masyarakat hendaknya membuat suatu komunitas dan menunjuk salah satu masyarakat untuk menjadi *leader*. Selanjutnya, hendaknya masyarakat mengelola sendiri lingkungannya melalui pengelolaan sampah secara 3R dan memperbaiki drainase yang tersumbat oleh sampah. Ketiga masyarakat hendaknya mampu mengelola usaha kecil menengah berupa pengolahan ikan asin, pembuatan trasi, jajanan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agenda 21 Indonesia. 1997. **Strategi Nasional untuk Pembangunan**.
- Berner, Edward. 2007. **Helping a Large Number of People Become A Little Less Poor**: Mumbai: The Logic of Survival Entrepreneurs.
- Brahtz, J.F.P. 1972. **Coastal Zone Management: Multiple Use with Conservation**. New York: John Wiley and Sons, Inc.
- Constanza R. 1992. **Toward An Operational Definition of Ecosystem Health**. In: Constanza R, Haskell BD, Norton BG, Editors. *Ecosystem Health: New Goals for Environmental Management*. Washington, DC: Island Press.
- Dahuri R.et.al: 2001 **Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan**

- Lautan secara teratur.** Kakarta: PT. Pradnya Paramitra.
- Hasbullah, Jousairi. 2006. ***Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)***. Jakarta, Penerbit MR-United Press
- Pangemanan AP et al. 2002. ***Sumberdaya Manusia (SDM) Masyarakat Nelayan***. www.rudict.tripod.com. 22 Mei 2003.
- Perikanan dalam angka 2009.
- Perikanan dalam angka 2010.
- Prof. Dr. Emil Salim. 2003. ***Orasi Ilmiah Pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2003*** Kampus IPB Baranangsiang, Sains dan Pembangunan Berkelanjutan.
- Keraf, A. Sonny, 2006. ***Etika Lingkungan***. Jakarta: Kompas.
- Kusnadi, 2007. ***Jaminan Sosial Nelayan***. Yogyakarta: Penerbit Lkis.
- Rudlin, David dan Nicholas Falk. 2009. ***Sustainable Urban Neighbourhood-Building The 21st Century Home***. Britain: Great Britain.
- Soegiarto, A. 1976. ***Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir***. Jakarta: Lembaga Oseanologi Nasional.
- Supriharyono. 2000. ***Coastal and Marine Environmental Problems in East Kalimantan Province*** (Inpress).
- Woolcock, M. 1998. ***Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework. Theory and Society, 27 (1), 151-208***. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Foundation of Social Capital*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited
- Zhu, Yingxin dan Borong Lin. 2003. ***"Sustainable Housing and Urban Constraction in China"*** dalam jurnal *Science Direct Energy and Buildings* 36 (2004) halaman 1287-1297.